KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN APU - PPT

di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Kementerian Perdagangan

November 2026

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Introduction

Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) merupakan **program kerja pemerintah** untuk memastikan bahwa **uang hasil kejahatan tidak dapat disamarkan,** digunakan untuk **membiayai terorisme**, atau digunakan untuk **mendukung pengembangan senjata pemusnah massal.**

Tujuan utama dari **penyusunan Rencana Aksi Nasional** ini adalah **melindungi sistem keuangan, menjaga keamanan negara, dan mencegah kejahatan keuangan.**



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Tiga Fokus Utama dalam Rencana Aksi Nasional



TPPU

Mencegah pelaku kejahatan menyamarkan uang hasil korupsi, narkotika, penipuan, perdagangan ilegal, dan kejahatan lainnya agar terlihat seperti uang yang sah.



TPPT

Mencegah aliran dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme, termasuk pengumpulan, pemindahan, dan penggunaan dana.



PPPSPM

Mencegah dana atau aset digunakan untuk mendukung pengembangan, pengadaan, maupun penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia secara ilegal.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Langkah Utama Rencana Aksi

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPPSPM tertuang dalam Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPPSPM 2025–2029

01 Koordinasi antar Instansi
Memperkuat koordinasi antar instansi, seperti PPATK, OJK, Bank Indonesia, kepolisian, kejaksaan, BNPT, dan kementerian/lembaga lainnya.

02 Pengawasan Transaksi Keuangan
Memperketat pengawasan transaksi keuangan, untuk mendeteksi transaksi mencurigakan sejak dini.

03 Transparan Kepemilikan Perusahaan
Meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan, agar diketahui siapa pemilik atau penerima manfaat sebenarnya *(beneficial ownership)*.

04 Penegakan Hukum
Meningkatkan penegakan hukum, termasuk penyidikan dan penanganan perkara TPPU serta pendanaan terorisme.

05 *Asset Recovery*
Mengoptimalkan pemulihan aset *(asset recovery)*, yaitu melacak, membekukan, menyita, dan merampas aset yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai ketentuan hukum.

06 Sanksi Keuangan
Menerapkan sanksi keuangan yang ditargetkan terhadap pihak yang terkait terorisme dan pendanaan proliferasi.

07 Kompetensi SDM
Meningkatkan kompetensi SDM dan teknologi informasi untuk mendukung deteksi dan analisis transaksi keuangan

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU

01

Bappebti melalui Biro Pengawasan dan Penindakan PBK, SRG, dan PLK dan Biro Perundang-undangan PBK, SRG, dan PLK menjadi **anggota dari Lembaga Pengawas dan Pengatur** ini berdasarkan Keputusan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan RI selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan pemberantasan TPPU Nomor MKH-6.HK.01.01 Tahun 2026 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaga Pengawas dan Pengatur berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

02

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPPSPM, **Indonesia mengadopsi standar yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF).** Selanjutnya FATF melalui *Mutual Evaluation Review* (MER) akan melakukan evaluasi atau penilaian sejauh mana Indonesia menerapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT dan PPPSPM.

03

Selain sebagai anggota dari Lembaga Pengawas dan Pengatur, **Bappebti juga menjadi Anggota dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

04

Sebagai Anggota dari Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Lembaga Pengawas dan Pengatur, **Bappebti memiliki kewajiban** diantaranya melakukan **internalisasi dan/ atau publikasi** repositori *e-learning* terkait APU PPT dan PPSPM serta daftar *experts* untuk kegiatan FATF/ APG dan ahli di bidang APU PPT dan PPSPM.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Repositori *E-Learning* APU-PPT dan PPPSPM

Masyarakat umum maupun pelaku usaha dapat mempelajari lebih dalam dan meningkatkan kompetensinya terkait APU PPT melalui bahan repositori *e-learning* terkait APU PPT dan PPSPM.



Repositori E-Learning APU PPT dan PPPSPM

1 FATF
https://fatfacademy.fatf-gafi.org

FATF Academy merupakan media untuk mempelajari 40 Rekomendasi FATF dan pengetahuan mengenai TPPU, TPPT dan PPSPM.

Platform ini hanya tersedia secara eksklusif bagi pejabat pemerintah dari negara-negara anggota FATF, negara-negara anggota FSRB dan Sekretariatnya, serta Organisasi *Observer* FATF. Platform FATF *Academy* tidak tersedia bagi sektor swasta.

Tata Cara Akses

- Mendaftar kedalam *e-learning* (sangat disarankan menggunakan email Pemerintahan)
- Menunggu 2-3 hari untuk aktivasi dari pihak FATF
- Pada kurikulum "FATF *Recommendation*" - mengingat hasil *post-test* akan dipakai untuk STC, JAT, ICRG *Reviewer* maupun pelatihan resmi FATF lainnya, mohon tidak tergesa-gesa untuk mengerjakannya. Nilai minimal yang diminta adalah 75%.

2 Egmont
https://learn.ecofel.org/learn

Platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Egmont Group untuk mendukung peningkatan kapasitas di bidang intelijen keuangan, anti pencucian uang, dan pencegahan pendanaan terorisme.

Materi pembelajaran ditujukan terutama bagi *Financial Intelligence Units* (FIU) dan otoritas terkait.

Tata Cara Akses

- Dapat melakukan pendaftaran secara mandiri (sangat disarankan menggunakan email pemerintahan)

3 UNODC
https://www.unodc.org/elearning/

Platform e-learning UNODC yang menyediakan pelatihan tentang pencegahan kejahatan, antikorupsi, dan penegakan hukum. Materi disusun untuk mendukung peningkatan kapasitas aparat dan pembuat kebijakan.

Tata Cara Akses

- Dapat melakukan pendaftaran secara mandiri (sangat disarankan menggunakan email pemerintahan)

4 Basel Institute
https://learn.baselgovernance.org/

Basel *Governance eLearning* adalah *platform* pembelajaran daring yang disediakan oleh Basel *Institute on Governance* untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan di bidang tata kelola, antikorupsi, kepatuhan, dan pencegahan kejahatan keuangan.

Platform ini menawarkan kursus interaktif yang dirancang untuk praktisi sektor publik maupun swasta, dengan fokus pada penerapan praktis dan standar internasional.

Tata Cara Akses

- Dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

5 PPATK
https://ifiilearn.ppatk.go.id/

Platform *e-learning* resmi dari Pusdiklat APU-PPT PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang menyediakan pelatihan terkait anti-pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Tata Cara Akses

- Dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR EXPERTS UNTUK KEGIATAN FATF/APG DAN DI BIDANG APU-PPT DAN PPPSPM

PER 12 DESEMBER 2025

Adapun sebagai sarana komunikasi terkait kegiatan persiapan MER 2029-2030 oleh FATF apabila ada hal yang perlu ditanyakan dapat menghubungi *experts*.



EXPERTS DARI INDONESIA (INSTANSI PPATK)

NAMA	INSTANSI	AREA OF EXPERTISE (IO)	E-MAIL
Diana Soraya Noor	PPATK	IO 2 dan 6	diana.soraya@ppatk.go.id
Syahril Ramadhan	PPATK	IO 2, 3, 4, dan 6	syahril.ramadhan@ppatk.go.id
Ferti Srikandi S	PPATK	IO 3, 4, 6, 7, 10, dan 11	ferti.srikandi@ppatk.go.id
Vidyata Annisa A	PPATK	IO 1, 2, dan 6	vidyata.annisa@ppatk.go.id
Ayu Utami	PPATK	IO 3, 4 dan 10	ayu.utami@ppatk.go.id
I Nyoman Sastrawan	PPATK	IO 1	nyoman.sastrawan@ppatk.go.id
Mardiansyah	PPATK	IO 1	mardiansyah@ppatk.go.id
I Wayan Yasa Nugraha	PPATK	IO 2, 6, dan 9	Wayan.yasa@ppatk.go.id
Rista Sihombing	PPATK	IO 2, 6 dan 10	Rista.sihombing@ppatk.go.id
Mirnah Amir Makkau	PPATK	IO 3 dan 4	Mirnah.amir@ppatk.go.id
Laila Ulfah Kusdinah	PPATK	IO 2 dan 11	Laila.ulfah@ppatk.go.id
Venti Pertiwl	PPATK	IO 2 dan 6	Venti.pertiwi@ppatk.go.id
Restu Aji Purwaka	PPATK	IO 2, 5, dan 6	Restu.aji@ppatk.go.id
Rusli Safrudin	PPATK	IO 2 dan 6	Rusli.safrudin@ppatk.go.id
Dominicus Suseno	PPATK	IO 2 dan 6	Dominicus.suseno@ppatk.go.id

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR EXPERTS UNTUK KEGIATAN FATF/APG DAN DI BIDANG APU-PPT DAN PPPSPM

PER 12 DESEMBER 2025

EXPERTS DARI INDONESIA (INSTANSI LAIN)

NAMA	INSTANSI	AREA OF EXPERTISE (IO)	E-MAIL
Robby Kurniawan	OJK	IO 3 dan 4	robby.kurniawan@ojk.go.id
Danarto Tri S	B.I.	IO 3 dan 4	danarto_ts@bi.go.id
Solihin	OJK	IO 3 dan 4	solihin@ojk.go.id
Robertus Dede	POLRI	IO 7	robertdedeo@yahoo.com
Tarisa Chaira	OJK	IO 3 dan 4	tarisa.chaira@ojk.go.id
Boby Mokoginta	KEJAKSAAN	IO 7 dan 8	Boby.mokoginta@kejaksaan.go.id
M. Fahruroz	KEMENKUM	IO 5	fahrurozi@ahu.go.id
Doli Aulia K. N.	KEMENKUM	IO 2	doli.nasution@ahu.go.id
M. Randy Ramadhan	BNPT	IO 9 dan 10	muhammadrandyramadhan@gmail.com

EXPERTS DARI NEGARA LAIN

NAMA	NEGARA	AREA OF EXPERTISE (IO)	E-MAIL
Hangtian Ye	China	IO 1, 10 dan 11	yhangtian@pbc.gov.cn
Smarak Swain	India	IO 1	smarak.swain@gov.in
Christopher Sin	Hong Kong	IO 1, 7, dan 8	christophercksin@police.gov.hk
Masayuki Nakamura	Jepang	IO 5, 10, dan 11	masayuki.nakamura2@mof.go.jp
Sabina Kook	Amerika Serikat	IO 10 dan 11	sabina.kook@treasury.gov
Josie Chantrell	Australia	IO 2 dan 8	josie.chantrell@homeaffairs.gov.au
Amrutha Palla	India	IO 1	amrutha.varshini@gov.in
Jack Matthews	Australia	IO 1 dan 8	jack.matthews@homeaffairs.gov.au
Robert Milnes	Selandia Baru	IO 3	robert.milnes@dia.govt.nz
Duarte Chagas	Makau	IO 3 dan 4	chagas@dicj.gov.mo
Jose Carapinha	Makau	IO 5, 6, dan 7	jose_carapinha@gif.gov.mo
Nirmala Devi R	Malaysia	IO 5	nirmala@bnm.gov.my
Shoko Ikarashi	Jepang	IO 7	shoko.ikarashi@mof.go.jp
Koyu Torizawa	Jepang	IO 3, 10, dan 11	koyu.torizawa@mof.go.jp
Sh Shreyas	India	IO 6	shreyas@incometax.gov.in

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



Thank You

Lead with Words.
Connect with Purpose.